



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

**SIARAN PERS
No. 211/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026**

Menko Pangan: Swasembada Pangan Jadi Prioritas Presiden Prabowo

Jakarta, 2 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan.

Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan hal itu dalam Dialog Kebangsaan bertema “Macro Economic Outlook: Akselerasi Investasi & Stabilitas Ekonomi Nasional” yang digelar DPP Himpunan Alumni IPB di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5) malam.

Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo sejak lama menaruh perhatian besar pada agenda swasembada pangan. Menurut dia, swasembada bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga jalan untuk mengangkat pendapatan 30 sampai 40 persen masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ia menilai persoalan pangan selama ini tidak hanya berada pada produksi, tetapi juga biaya distribusi yang tinggi. Zulhas membandingkan biaya untuk menghadirkan satu kilogram beras di Thailand sekitar Rp4 ribu, sementara di Indonesia bisa mencapai Rp14 ribu akibat kebijakan yang tidak tepat.

Untuk memangkas biaya tinggi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Presiden. Kebijakan itu diarahkan agar harga pangan lebih efisien, rantai distribusi lebih pendek, dan kesejahteraan pelaku pangan di desa meningkat.

Zulhas juga menyampaikan arahan Presiden agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif. Tidak boleh ada lahan yang dibiarkan tidak ditanami. Pemanfaatan teknologi juga akan diperkuat dengan dukungan perguruan tinggi, lembaga riset, alumni IPB, dan BRIN.

Tahun ini, pemerintah memberi perhatian khusus kepada sektor nelayan. Zulhas menilai nelayan selama ini berada pada posisi tawar yang lemah karena hasil tangkapan harus segera dijual sebelum rusak. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan bila pasar tidak menyerap.

Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi infrastruktur ekonomi desa. Koperasi ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjadi saluran bantuan pemerintah agar distribusi dari pusat ke desa lebih ringkas.

Ketua Umum terpilih Himpunan Alumni IPB, Fauzi Amro, menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan rantai pasok pangan nasional. Dukungan itu akan dilakukan melalui koperasi desa dan jaringan alumni IPB di berbagai daerah, terutama untuk membangun model rantai pasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Dialog kebangsaan tersebut menjadi forum sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan alumni dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, inovasi, serta pemberdayaan ekonomi desa.

Narahubung.

Dr. Gunawan, S.T., M.Si.

Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

0813-2186-7406